



Pesimisme Habuti Serapan APDB 2015

PUTRI ANISA YULIANI

OPTIMISME Pemprov DKI Jakarta menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 justru menimbulkan kekawatiran sejumlah pihak. Mungkin hanya belanja rutin seperti gaji dan pembelian barang-barang yang lancar, sedangkan belanja pembangunan diperkirakan tersendat-sendat dilaksanakan hingga akhir 2015.

Kekawatiran itu disampaikan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng kepada *Media Indonesia*, akhir pekan lalu. Robert beralasan masa tahun anggaran semakin pendek dengan berbagai proses yang harus ditempuh Pemprov DKI Jakarta untuk meloloskan APBD 2015.

Robert membandingkannya seperti saat APBD 2014 disahkan tepat waktu dan pemprov memiliki satu tahun penuh untuk penyerapan. Hasilnya, pemprov hanya mampu merealisasikan anggaran 50%. Dengan proses APBD 2015 yang memasuki pekan ketiga April, Rapergub APBD belum juga disahkan Kemendagri karena masih dikoreksi.

Singkatnya waktu tersebut membuat Robert ragu penyerapan APBD tahun ini bisa maksimal.

"Tahun lalu saja saat pagunya penuh dan tidak terlambat, tetapi penyerapannya sudah masuk yang terburuk di seluruh Indonesia. Apalagi dengan tahun ini. Praktis pemprov hanya punya waktu 7,5 bulan. Saya ragu," kata Robert.

Upaya penyerapan

Untuk menggenjot penyerapan APBD 2015, Robert menyarankan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mampu mengendalikan mulut dan lebih banyak bekerja. Sudah cukup sikap emosional yang ia tampilkan selama ini. "Masyarakat ingin melihat kinerjanya, jangan nanti dinilai Gubernur hanya omong doang," imbuhnya.

Ahok harus bekerja keras mengawasi aparat birokrasi dalam melaksanakan program kerja. Ahok, lanjut Robert, tetap diawasi DPRD dalam implementasi APBD meskipun dasar penetapan APBD menggunakan pergub.

Ia juga berharap Kemendagri tegas memberikan sanksi berupa penundaan pemberian gaji dan berbagai tunjangan serta fasilitas kepada anggota DPRD dan Gubernur DKI karena terlambat dalam pembahasan APBD 2015. Sanksi tersebut turut diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

"Jika Kemendagri tidak tegas sanksinya terhadap Pemprov DKI, ini menjadi preseden buruk. Sudah ada surat edaran, di daerah lain sanksi sudah diterapkan. Kalau Jakarta tidak, apa kata dunia?" kata dia.

Di lain pihak, Ahok tetap optimis penyerapan APBD bisa maksimal karena sudah ada *e-catalogue* dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Jadi setiap kebutuhan pengadaan barang dan jasa telah terpampang jelas dalam sistem tersebut. Pada proses lelang menggunakan *e-catalogue*, setiap pihak swasta yang ingin mengikuti lelang di-

Ahok harus mampu mengendalikan mulut dan lebih banyak bekerja. Sudah cukup sikap emosional yang ia tampilkan selama ini.

wajibkan melampirkan catatan pengalaman kerja serta berbagai spesifikasi sistem produksi yang dimiliki. Hal itu memudahkan

pemprov dalam sistem lelang sehingga Ahok yakin penyerapan akan tetap maksimal. "Kita sudah punya *e-budgeting* dan *e-catalogue*. Semua terlihat disitu, itu bisa mempercepat. Kalau tahun lalu kan rendah karena *e-catalogue* baru mulai tengah tahun. Pegawai kita belum biasa," ujar Ahok.

Sekda DKI Jakarta Saefullah menambahkan pengadaan barang dan jasa saat ini tidak lagi terpusat di Balai Kota DKI Jakarta, tapi di tujuh lokasi, sehingga membuat beban lelang pengadaan barang berkurang. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki tujuh ULP yang tersebar di 5 wilayah, 1 kabupaten, dan 1 tingkat provinsi sehingga beban untuk melakukan lelang kegiatan bisa dibagi. (J-3)

**putrianisa
@mediaindonesia.com**